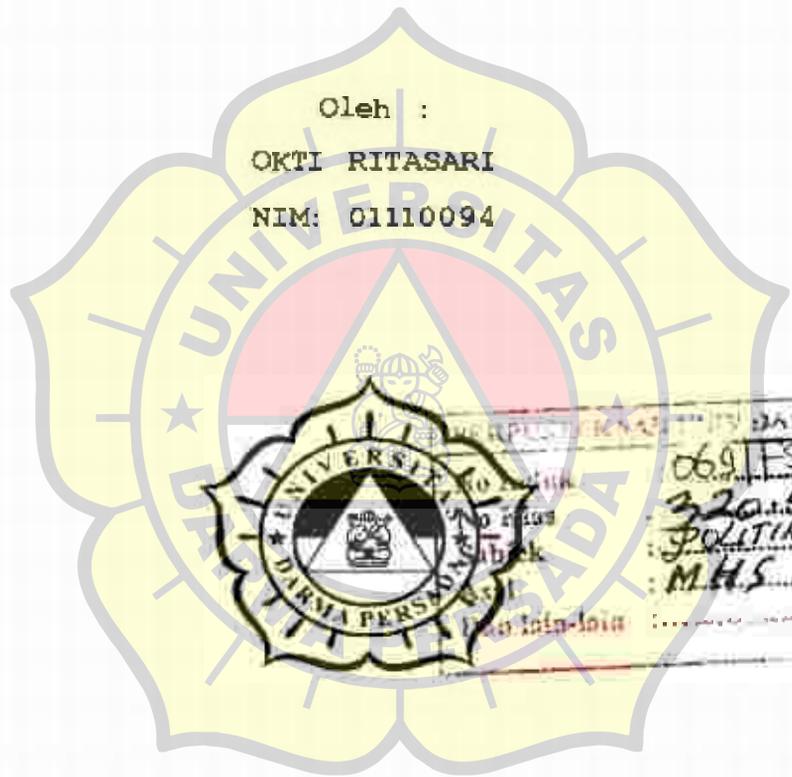


UNIVERSITAS DARMA PERSADA
PERPUSTAKA

UPAYA COMMODORE MATTHEW CALBRAIGHT PERRY DALAM
MEMBUKA POLITIK SAKOKU JEPANG

Skripsi Sarjana ini diajukan sebagai
salah satu persyaratan mencapai gelar
Sarjana Sastra



Oleh :
OKTI RITASARI
NIM: 01110094

PROGRAM STUDI BAHASA DAN SAstra JEPANG
FAKULTAS SAstra
UNIVERSITAS DARMA PERSADA
JAKARTA
2 0 0 6

Balasan Persetujuan Pembimbing

Skripsi yang berjudul:

UPAYA COMMODORE MATTHEW CALBRAIGHT PERRY DALAM MEMBUKA
POLITIK SAKOKU JEPANG

Oleh

OKTI RITASARI

NIM: 01110094

Disetujui untuk di ujikan dalam sidang ujian Skripsi
Sarjana, oleh:

Pembimbing I

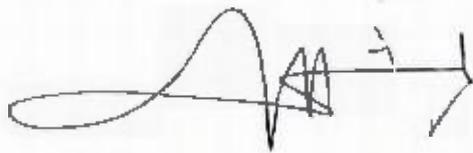
(Prof. Dr. I Ketut Surajaya, M.A.)

Mengetahui,

Ketua Program Studi Bahasa

dan Sastra Jepang

Pembimbing II



(Syamsul Bahri, S.S)



(Nani Dewi Sunengsih, S.S, M.Pd)

Skripsi Sarjana yang berjudul:

**UPAYA COMMODORE MATTHEW CALBRAIGHT PERRY DALAM MEMBUKA
POLITIK SAKOKU JEPANG**

Telah diuji dan diterima baik (lulus) pada tanggal 10 bulan
Maret, tahun 2006 dihadapan Panitia Ujian Skripsi Sarjana
Fakultas Sastra.

Pembimbing/Penguji

Ketua Panitia/Penguji



(Prof. Dr. Ketut Surajaya, M.A.)



(Dra. Yuliasih Ibrahim)

Pembaca/Penguji

Sekretaris Panitia/Penguji



(Nani Dewi Sunengsih, S.S., M.Pd.)



(Metty Suwandany, S.S.)

Disahkan oleh :

Ketua Jurusan

Bahasa dan Sastra Jepang

Dekan Fakultas Sastra



(Syamsul Bahri, S.S.)



FAKULTAS SASTRA



(Dr. Hj. Albertine S. Minderop, M.A.)

Halaman Pernyataan

Skripsi yang berjudul:

UPAYA COMMODORE MATTHEW CALBRAIGHT PERRY DALAM MEMBUKA
POLITIK SAKOKU JEPANG

Merupakan karya ilmiah yang saya susun di bawah bimbingan Prof. Dr. I Ketut Surajaya, M.A, dan Ibu Nani Dewi Sunengsih, S.S, M.Pd tidak merupakan jiplakan Skripsi Sarjana atau karya orang lain, sebagian atau seluruhnya, dan isinya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2006

Okti Ritasari

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Upaya Commodore Matthew Calbraight Perry Dalam Membuka Politik Sakoku Jepang** sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana sastra, jurusan Asia Timur, Program Studi Bahasa dan Sastra Jepang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan arahan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Ketut Surajaya, M.A, selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran selama penulisan skripsi ini, serta kesabaran dalam mengerahkan penulis.
2. Ibu Nani Dewi Sunengsih, S.S, M.Pd, selaku pembaca yang telah memberikan masukan - masukan terhadap skripsi ini.

11.Seluruh teman dan pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas sastra Jepang khususnya dan seluruh mahasiswa Universitas Darma Persada umumnya serta pihak yang membutuhkannya.



Jakarta, Maret 2006

Penulis

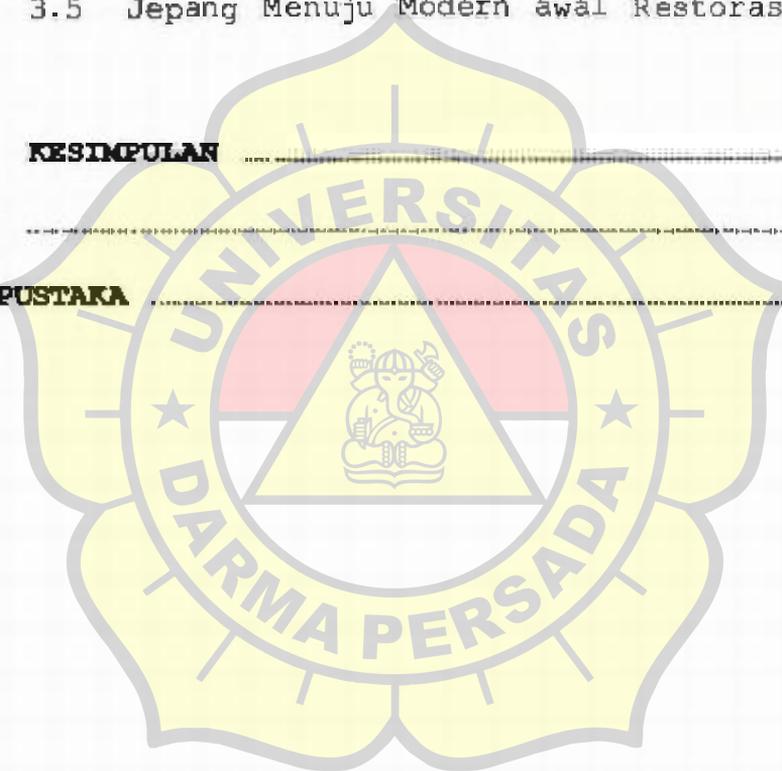
Okti Ritasari

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II SEJARAH SINGKAT JEPANG SEBELUM KEDATANGAN MATHEW CALBRAIGHT PERRY	9
2.1 Masa Pemerintahan Periode Tokugawa Ieyasu	9
2.2 Masa Penutupan Negara (Sakoku)	12
2.2.1 Masa Lahirnya Bushido	14
2.2.2 Kebijakan Pemerintah Tokugawa Selama Penutupan Negara	17
2.2.3 Tuntutan Membuka Negara	21
BAB III UPAYA COMMODORE PERRY DALAM MEMBUKA POLITIK SAKOKU JEPANG	24
3.1 Kedatangan Commodore Mathew Calbraight Perry	24

3.2	Upaya - Upaya Commodore Matthew Calbraight Perry dalam Pembukaan Politik Sakoku	28
3.3	Runtuhnya Pemerintahan Bakufu Tokugawa ...	32
3.4	Dampak Berakhirnya Politik Negeri Tertutup (Sakoku)	37
3.5	Jepang Menuju Modern awal Restorasi Meiji	40

BAB IV	KESIMPULAN	45
GLOSARY	50
DAFTAR PUSTAKA	52



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Latar belakang utama ancaman Barat atas Jepang adalah perdagangan negara - negara maritim dengan Cina. Krisis mulai muncul pada tahun 1839 ketika Inggris merebut Hongkong dan Amerika Serikat membuka jalur pelayaran ke Shanghai (Cina) pada tahun 1848. Sejak itulah semua negara Barat yang mempunyai hubungan dagang dengan Cina membentuk apa yang disebut "Treaty Port System" (Sistem Perjanjian Pelabuhan).¹

Sistem perjanjian pelabuhan tersebut dalam pandangan orang Jepang, merupakan sebuah ancaman. Kepentingan - kepentingan Amerika lah yang pada akhirnya membawa upaya yang lebih sungguh - sungguh untuk membuka Jepang. Sejak Amerika memperoleh wilayah pantai yang luas di Pasifik khususnya jalur pelayaran Amerika ke Shanghai Cina, Amerika sangat menyadari betapa pentingnya Jepang. Karena

¹ W.G. Beasley, *Pengalaman Jepang*, terj. Masei Maris. (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm.241.

pulau - pulau Jepang terletak pada jalur pelayaran dari San Francisco Amerika Serikat ke pantai Cina dan diketahui dari laporan - laporan atau informasi dari Belanda bahwa pulau - pulau itu memiliki endapan batubara, maka pulau - pulau Jepang itu jelas sangat berguna sebagai tempat singgah bagi kapal - kapal Amerika.

Karena itu pelabuhan - pelabuhan di Jepang menjadi sangat berarti bagi Amerika dan negara - negara Barat lainnya. Namun untuk memasuki Jepang semua itu tidaklah mudah, karena sejak tahun 1639 Jepang menutup diri dari dunia luar yang dikenal dengan nama *Politik Sakoku* (Politik Negeri Tertutup) yang merupakan salah satu periode terpenting dalam sejarah panjang Jepang.

Ketika Toyotomi Hideyoshi berkuasa di Jepang pada tahun 1573, usaha - usaha membuka hubungan dagang dengan luar negeri sudah mulai dirintis. Tindakan Hideyoshi tersebut diikuti oleh Tokugawa Ieyasu yang juga sadar akan keuntungan dari perdagangan bagi Jepang. Selain dengan Cina, Belanda dan Inggris, *Bakufu* juga cenderung mengadakan hubungan dagang dengan Portugis dan Spanyol. Hubungan dagang ini lama kelamaan menjadi maju dan ramai.

Perdagangan yang ramai itu juga mendorong perluasan agama Kristen di kalangan masyarakat Jepang.

Melihat perkembangan agama Kristen yang begitu pesat Tokugawa Ieyasu mulai khawatir karena ajaran tersebut sangat bertolak belakang dengan sistem masyarakat feodal yang sedang berlangsung di Jepang, dan sadar akan ancaman bahaya politik yang ditimbulkan oleh ajaran tersebut terhadap masa depan Jepang karena ajaran tersebut telah menimbulkan perpecahan diantara rakyat dan melemahkan kesetiaan rakyat terhadap *Shogun*. Walau perdagangan luar negeri sangat menguntungkan perekonomian Jepang, namun Tokugawa Ieyasu sangat menyadari ancaman - ancaman yang ditimbulkan oleh agama tersebut, karena sifatnya yang tidak mengakui adanya dewa - dewa *Shinto*. Akibatnya pada tahun 1606 ia mengeluarkan peraturan Anti Kristen.

Pada tahun 1616 tindakan penindasan tersebut dipertegas oleh Tokugawa Hidetada pengganti Ieyasu dan mencapai puncaknya pada pemerintahan *Shogun* Iemitsu yang mengakibatkan pemberontakan kaum tani dan Samurai Kristen yang dikenal dengan nama *Shimabara no Ran* (1637 - 1638) sehingga *Bakufu* semakin memperkeras tekanan pada pengikut Kristen di Jepang dan menghentikan sama sekali

perdagangan dengan Spanyol dan Portugis, serta mengusir mereka yang sudah terlanjur berada di Jepang.

Satu - satunya bangsa Eropa yang masih diizinkan berdagang hanyalah bangsa Belanda karena saudagar - saudagar Belanda yang datang ke Jepang hanya bertujuan untuk mencari keuntungan semata. Mereka tidak tertarik untuk menyebarkan agama Kristen, bahkan yang lebih penting lagi mereka banyak membawa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Barat ke Jepang.

Bakufu juga berkampanye bahwa perdagangan dengan orang - orang Asing tidak berguna dan sangat merugikan Jepang maka pada tahun 1639 mereka memutuskan untuk menutup negaranya dari pengaruh asing dengan sangat ketat. Akibat penutupan diri atau Politik Sakoku yang berlangsung sejak 1639 sampai tahun 1854 ini adalah :²

1. putusnya hubungan Jepang dengan luar negeri,
2. pesatnya perdagangan dalam negeri,
3. masyarakat feodal berlangsung lama,
4. tertinggalnya kemajuan masyarakat.

² Yeti Nurhayati, *Langkah - Langkah Awal Modernisasi Jepang* (Jakarta:PT. Pustaka Dian Rakyat, 1982), hlm.38.

Manfaat terpenting dari politik penutupan diri ini adalah Jepang telah berhasil menciptakan perdamaian yang mutlak dan tahun - tahun tenang dan damai telah membawa Jepang ke arah perubahan - perubahan sistem yang membuat Jepang menjadi satu negara kesatuan. Masa damai yang panjang ini memungkinkan terjadinya perkembangan Kebudayaan, Ilmu pengetahuan dan Kesenian serta mengembangkan identitas nasional.

Seiring dengan perkembangan jaman, memasuki abad ke-18 saat Jepang masih mempertahankan kebijakan penutupan dirinya, kapal - kapal dagang dari berbagai negara seperti Rusia, Inggris dan Amerika mulai berdatangan mendekati pantai - pantai Jepang dengan jumlah yang terus bertambah.

Maka pada tahun 1844 Raja Belanda Willem II mengirim surat kepada shogun Tokugawa yang isinya memperingatkan bahwa lalu - lintas yang sangat ramai tidak memungkinkan Jepang untuk menutup diri selama - lamanya.

Sementara itu di seberang laut Pasifik, Amerika Serikat telah berkembang menjadi sebuah negara yang besar, maju dan kuat. Perdagangan mereka dengan negeri -

negeri seberang pun makin bertambah sehingga kapal - kapal dagangnya mulai melayari semua bagian dunia.

Pelayaran Amerika menjadi lebih penting karena sejak tahun 1812 negara ini sudah memiliki Industri penangkapan ikan paus. Namun, kapal - kapal penangkap ikan paus mereka di laut Okhotsk sebelah utara Jepang sering dilanda badai hingga sampai ke Ezo (Hokkaido). Oleh karenanya Amerika merasa perlu lalu - lintas laut yang lebih baik yang dapat disinggahi untuk menambah perbekalan, mengisi bahan bakar serta memperbaiki kerusakan - kerusakan kapal.

Untuk itu pada tahun 1853 Commodore Matthew Calbraight Perry, Komandan Squadron Hindia Timur memasuki Uraga datang dengan empat kapal perangnya dan membawa surat resmi dari Presiden Millard Fillmore yang menyatakan ingin mengadakan hubungan dagang dengan Jepang. Namun pemerintah Bakufu meminta waktu satu tahun untuk mempertimbangkannya.³

Pada tahun 1854 atau satu tahun setelah itu, Matthew Perry kembali datang untuk meminta jawaban. Namun kali ini Perry datang dengan tujuh kapal perang hitamnya

³ /*ibid.*, hlm. 22